

ABSTRAK

Collaborative Governance adalah pendekatan interaksi, dialog dan negosiasi yang dilakukan secara terus menerus antar pemangku kepentingan tersebut untuk mencapai kesepakatan bersama dalam merancang, mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan atau program tertentu. Fenomena dalam penelitian ini adalah *Collaborative Governance* antara pemerintah Kabupaten Bireuen dalam bekerja sama dengan stakeholder untuk menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bireuen yang terus mengalami peningkatan. Dasar hukum penelitian ini adalah Keputusan bupati Bireun Nomor 519 Tahun 2023 Tentang pembentukan Tim terpadu koordinasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta *MoU* Nomor: 01/2028/GP/MOU/KERJASAMA/VIII/2023 Tentang upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penelitian ini ingin melihat bagaimana tahapan *Collaborative Governance* dalam penanganan penyalahgunaan narkoba, proses *Collaborative Governance*, serta faktor penghambat *Collaborative Governance* dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bireuen. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Teori Collaborative Governance Ansell&Gash. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan cara turun langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung bagaiman tahapan proses serta faktor penghambat dalam kerja sama dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bireuen. Hasil dari penelitian menunjukan dalam proses *Collaborative Governance* yang dilakukan di Kabupaten Bireuen untuk penanganan kasus narkoba yang semakin meningkat telah dilakukan kerjasama antara pemerintah dengan para *stakeholder* yang ada di Kabupaten Bireuen sesuai dengan amanat Undang-undang dan Peraturan Bupati hanya saja dalam prosesnya terdapat beberapa kendala seperti budaya masyarakat, keterlibatan formal lembaga swasta, serta kurangnya forum organisasi tetap antar aktor.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Narkoba, Kabupaten Bireuen

ABSTRACT

Collaborative Governance is an approach to interaction, dialogue, and negotiation that is carried out continuously among stakeholders to achieve mutual agreement in designing, implementing, and evaluating specific policies or programs. This research phenomenon is the Collaborative Governance between the Bireuen Regency government and stakeholders to address the increasing problem of drug abuse in Bireuen Regency. The legal basis of this research is the Bireuen Regent's Decision No. 519 of 2023 concerning the establishment of an Integrated Team for the Coordination of Prevention of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking, and the MoU No. 01/2028/GP/MOU/KERJASAMA/VIII/2023 concerning efforts to prevent and eradicate narcotics abuse and illicit trafficking. This research aims to examine the stages of Collaborative Governance in addressing drug abuse, the Collaborative Governance process, and the inhibiting factors of Collaborative Governance in handling drug abuse in Bireuen Regency. The theory used in this research is the Collaborative Governance theory by Ansell & Gash. The method used in this research is qualitative with a descriptive research type, where the researcher directly observes the field to see the stages of the process and inhibiting factors in collaboration in handling drug abuse cases in Bireuen Regency. The results of the research show that in the Collaborative Governance process carried out in Bireuen Regency to address the increasing cases of narcotics, cooperation has been established between the government and stakeholders in Bireuen Regency in accordance with the mandate of the law and regulations. However, there are several obstacles in the process, such as community culture, formal involvement of private institutions, and the lack of a permanent organizational forum among actors.

Keywords: *Collaborative Governance, Narcotics, Bireuen Regency*